



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2009 - 2010
Masa Persidangan	:	1 (Satu)
Rapat Ke	:	4 (Empat)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Pendidikan Nasional
Hari/Tanggal	:	Rabu, 11 Nopember 2009
Pukul	:	10.20 – 17.15 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	1. Perkenalan 2. Pemaparan Program Kerja 100 Hari Departemen Pendidikan Nasional 3. Lain-lain
Hadir	:	47 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Menteri Pendidikan Nasional beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

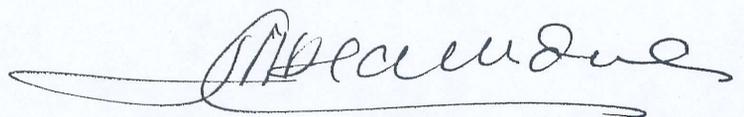
- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan seluruh anggota Komisi X DPR RI untuk memperkenalkan diri. Demikian halnya Menteri Pendidikan Nasional mempersilahkan jajarannya untuk juga memperkenalkan diri.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat, dilanjutkan mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan Nasional dan pertanyaan, masukan, serta saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :
 1. Komisi X DPR-RI dan Mendiknas sepakat bahwa program kerja 100 hari Depdiknas merupakan bagian dari program kerja dan anggaran yang telah disepakati dalam APBN 2009 maupun APBN 2010, yang harus dapat dilaksanakan dan diwujudkan.
 2. Karena itu, Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut :
 - i. Program pengadaan internet di sekolah-sekolah, harus dikaji mekanisme pelaksanaannya dengan memperhatikan aspek-aspek teknis, budaya, dan karakter bangsa. Selain itu, pengadaan internet secara massal di sekolah-sekolah, harus jelas kelanjutannya, agar tidak menciptakan masalah baru.

- ii. Masalah guru honorer, juga harus menjadi program kerja prioritas 100 hari, mengingat masalah ini telah lama dibahas dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2009.
 - iii. Penyaluran beasiswa harus jelas mekanisme penerapannya, baik dari sisi waktu maupun peruntukannya.
 - iv. Angka buta aksara masih sangat tinggi, sehingga perlu menjadi prioritas dalam program kerja 100 hari Mendiknas, sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
 - v. Program pengembangan karakter bangsa, sebaiknya disinergikan dengan Depbudpar yang selama ini telah mengembangkan kegiatan tersebut.
 - vi. Program pengembangan mutu dan kesejahteraan bagi guru-guru daerah perbatasan dan daerah terpencil, perlu mendapat prioritas dalam program kerja 100 hari Depdiknas.
 - vii. Program pengembangan kewirausahaan, harus jelas orientasi, sasaran dan daya dukungnya di dalam upaya menciptakan wirausahawan baru.
3. Komisi X DPR-RI mendesak Mendiknas untuk mengkaji kembali isu-isu krusial di bidang pendidikan nasional, antara lain; (i) pelaksanaan Ujian Nasional (UN); (ii) pelaksanaan BOS dan BOS buku; (iii) pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan; (iv) menyusun standar biaya perorangan siswa/mahasiswa di tiap jenjang pendidikan (pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi); (v) pembagian beban biaya untuk tiap jenjang pendidikan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; (vi) pembatasan bahkan pelarangan pungutan-pungutan di lembaga pendidikan yang memberatkan peserta didik; dan (vii) pembiayaan pendidikan peserta didik oleh lembaga perbankan, sehingga eksekusi yang timbul terhadap masalah pendidikan nasional di masa datang, dapat dikurangi.
 4. Komisi X DPR RI dengan Pemerintah sepakat untuk melakukan pendalaman materi program-program: (i) pra-renstra bidang pendidikan; (ii) ICT Pendidikan/TIK (Teknologi Informasi Komunikasi/Jardiknas); (iii) Pendidikan Kejuruan; dan (iv) Ujian Nasional.
 5. Komisi X DPR RI mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah di bidang pendidikan yang didasarkan pada prinsip: non-diskriminasi, baik dari sisi wilayah, ekonomi, kondisi fisik, gender, keagamaan, dan lain-lain.
 6. Komisi X DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kerja 100 hari Depdiknas dalam Rapat Intern Komisi X DPR RI.

III. Rapat diakhiri pada pukul 17.15 WIB

Jakarta, 11 Nopember 2009

PIMPINAN KOMISI X DPR RI
K E T U A,



PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og. †